

ABSTRAK

Khalisha Permatasari (01656190099)

UPAYA HUKUM BAGI NOTARIS YANG DIBERHENTIKAN DENGAN TIDAK HORMAT (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA NOMOR 235/G/2019/PTUN/JKT)

(1 lampiran)

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris harus berpedoman pada Undang-Undang Jabatan Notaris (“UUJN”), Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan peraturan lainnya. Berdasarkan Pasal 12 UUJN diterangkan bahwa pemberhentian Notaris dengan tidak hormat hanya dapat dilakukan oleh Menteri. Dalam memberikan keputusan pemberhentian kepada Notaris, Menteri mendapatkan usulan dari Majelis Pengawas Notaris Pusat dan Majelis Pengawas Wilayah Notaris. Keputusan atas adanya usulan tersebut harus melalui penerapan proses pemeriksaan yang Panjanghingga dapat diusulkannya pemberhentian dengan tidak hormat. dalam hal Notaris mendapatkan keputusan tertulis dari Menteri atas pemberhentianNotaris dengan tidak hormat, Notaris yang bersangkutan dapat mengajukan upaya hukum untuk tetap dapat mempertahankan harkat dan martabatnya sebagai Notaris dengan cara mengajukan Gugatan kepada Pengadilan tata Usaha Negara atas Keputusan tertulis Menteri tersebut. Bentuk perlindungan hukum oleh Notaris ini dapat dilakukan berdasarkan UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009.

Penulis menggunakan jenis Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Referensi: 31(1983-2021)

Kata Kunci: Notaris, Perlindungan Hukum, Pemberhentian Dengan Tidak Hormat.

ABSTRACT

Khalisha Permatasari (01656190099)

LEGAL REMEDY FOR NOTARY DISHONORABLE DISMISSAL (STUDY CASE OF DECISION STATE ADMINISTRATIVE COURT NUMBER NOMOR 235/G/2019/PTUN/JKT).

(1 Attachment)

In conducting their positions, Notaries must be guided by the Law on Notary Positions ("UUJN"), The Regulation of the Minister for Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and other regulations. Based on Article 12 of the UUJN, it is explained that dishonorable dismissal of a Notary can only be conducted by the Minister. In giving a decision to dismiss a Notary, the Minister shall obtain a proposal from the Central Notary Supervisory Council and the Notary Regional Supervisory Council. The decision on the proposal must go through a lengthy examination process until a dishonorable dismissal can be proposed. In this case, the Notary receives a written decision from the Minister on the dishonorable dismissal of the Notary, the Notary concerned can file legal remedies to maintain his dignity as a Notary by filing a lawsuit to the State Administrative Court on the written decision of the Minister. This form of legal protection by a Notary can be carried out based on Law no. 5 of 1986 in conjunction with Law no. 9 of 2004 in conjunction with Law no. 51 of 2009. The author uses a type of normative juridical research, namely research that emphasizes the use of written legal norms. The juridical approach is an approach that refers to the applicable laws and regulations.

References : 31(1983-2021)

Keyword(s): Notary, Legal Protection, Dishonorable Dismissal